



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Karang Baru 24476  
Email : [dit@katamiang.go.id](mailto:dit@katamiang.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**NOMOR : 425 / C / P-01 / 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN**

**IZIN OPERASIONAL SMA SWASTA MANARUL ISLAM  
KECAMATAN KIJUREAN MUDA KABUPATEN ACEH TAMIANG**

- Mengingat** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan pimpinan Dapok Manarul Islam nomor : 425 / 20 / 2014 tanggal 20 Maret 2014 dan guna pengembangan pendidikan dan penguatan kemampuan belajar dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang khususnya masyarakat sekitar Desa Brantak Kecamatan Kecamatan Kujurean Muda Kabupaten Aceh Tamiang, maka diwujudkan perlu untuk memberikan Izin Operasional SMA SWASTA MANARUL ISLAM Kecamatan Kujurean Muda;
  - b. Bahwa untuk kelengkapan syarat sebagaimana di maksud pada huruf a perlu di tetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indonesia Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Geyo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 menjadi Undang – Undang;
  7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  8. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  9. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengalihan Keuangan Negara;
  11. Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengalihan Keuangan Daerah;